13001 Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page 11948-11963

Simulasi Kebijakan Optimalisasi Retribusi Sektor Kopi dalam Mendukung Penguatan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Gayo Lues

Peni Ernita
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues
e-mail: peniernita037@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi optimalisasi retribusi sektor kopi sebagai salah satu instrumen penguatan desentralisasi fiskal Kabupaten Gayo Lues. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan simulasi kebijakan berbasis model kausal menggunakan Powersim Studio 10 Express. Data bersumber dari SIKD, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024, dan sumber resmi terkait sektor kopi. Kondisi fiskal menunjukkan bahwa PAD tahun 2024 sebesar Rp68,34 miliar hanya berkontribusi 8,06% terhadap total pendapatan daerah, sedangkan transfer pemerintah pusat mencapai 88,30%. Simulasi menggunakan luas lahan 3.500 ha, produksi green bean 560.000 kg, dan tarif retribusi Rp250/kg, sehingga potensi penerimaan mencapai Rp140 juta per tahun. Pada tingkat realisasi 30%, 50%, 70%, dan 100%, penerimaan masing-masing sebesar Rp42 juta, Rp70 juta, Rp98 juta, dan Rp140 juta per tahun. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan realisasi kebijakan meningkatkan penerimaan secara proporsional, namun kontribusinya masih kecil terhadap struktur fiskal daerah. Dengan demikian, optimalisasi retribusi kopi lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari strategi diversifikasi PAD dan penguatan tata kelola penerimaan, bukan sebagai instrumen tunggal untuk mencapai kemandirian fiskal.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Retribusi Daerah, Kopi, PAD, Simulasi Kebijakan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential for optimizing coffee sector levies as an instrument to strengthen fiscal decentralization in Gayo Lues Regency. A quantitative-descriptive approach was employed, utilizing a causal model-based policy simulation via Powersim Studio 10 Express. Data were sourced from the Regional Financial Information System (SIKD), Gayo Lues Regency Qanun Number 2 of 2024, and official sources regarding the coffee sector. Fiscal conditions indicate that the 2024 Locally-Generated Revenue (PAD) of IDR 68.34 billion contributed only 8.06% to total regional revenue, whereas central government transfers accounted for 88.30%. Simulations based on a land area of 3,500 hectares, green bean production of 560,000 kg, and a levy rate of IDR 250/kg yielded a revenue potential of IDR 140 million per year. At realization levels of 30%, 50%, 70%, and 100%, annual revenues amounted to IDR 42 million, IDR 70 million, IDR 98 million, and IDR 140 million, respectively. The results demonstrate that increasing policy realization leads to a proportional rise in revenue; however, its contribution to the regional fiscal structure remains minor. Consequently, optimizing coffee levies is best positioned as part of a strategy to diversify PAD and strengthen revenue governance, rather than as a sole instrument for achieving fiscal independence.

Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Levies, Coffee, Locally-Generated Revenue (PAD), Policy Simulation.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, di samping pengelolaan Transfer ke Daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional (Indonesia, 2022). Kebijakan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik secara efektif sekaligus mendorong kemampuan daerah membiayai sebagian kebutuhannya melalui sumber penerimaan yang berada dalam kewenangannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kerangka tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan daerah menghasilkan PAD relatif terhadap keseluruhan pendapatannya, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat dikelola berdasarkan potensi ekonomi dan kebijakan lokal. Hasil penelitian (Hasanah et al., 2025) menunjukkan bahwa komponen PAD, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, mempunyai peranan dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Sementara itu, optimalisasi sektor-sektor ekonomi unggulan juga dipandang penting karena memungkinkan pemerintah daerah menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan penguatan sumber penerimaan daerah secara lebih berkelanjutan (Tuah & Ompusunggu, 2025).

Kondisi fiskal Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih relevan. Berdasarkan Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk APBD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024, anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar Rp860,13 miliar dengan realisasi sebesar Rp847,45 miliar atau 98,53%. PAD dianggarkan sebesar Rp68,08 miliar dan terealisasi sebesar Rp68,34 miliar atau 100,39%. Dalam komponen PAD tersebut, realisasi pajak daerah sebesar Rp6,81 miliar, retribusi daerah sebesar Rp49,09 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp3,48 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp8,96 miliar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Meskipun realisasi PAD telah melampaui target anggaran, struktur pendapatan Kabupaten Gayo Lues masih menunjukkan besarnya peranan transfer dari pemerintah pusat. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp748,32 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp847,45 miliar, kontribusi PAD hanya sekitar 8,06%, sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai sekitar 88,30%. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan fiskal Gayo Lues bukan semata-mata terletak pada kemampuan mencapai target PAD, tetapi juga pada relatif kecilnya basis PAD dibandingkan dengan keseluruhan struktur pendapatan daerah. Dengan demikian, pengembangan dan diversifikasi sumber PAD berbasis potensi ekonomi lokal tetap memiliki relevansi strategis dalam upaya memperkuat desentralisasi fiskal daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Temuan ini konsisten dengan kajian tentang pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterbatasan PAD dan tingginya ketergantungan pada transfer masih menjadi salah satu tantangan bagi penguatan kemandirian fiskal.

Salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan dalam konteks tersebut adalah sektor kopi. Kopi merupakan bagian dari aktivitas perkebunan Kabupaten Gayo Lues dan telah berkembang tidak hanya pada tingkat produksi, tetapi juga pada kegiatan pengolahan dan pemasaran. Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional Tahun 2025 mencatat bahwa pengembangan kopi di Gayo Lues telah melibatkan areal sekitar 3.086 hektare, sebanyak 2.961 petani, dan 126 kelompok tani. Pada tahun 2025, Koperasi Kopi Gayo Lues Bersinar juga tercatat telah menjual sekitar 250 ton green bean kualitas ekspor dengan nilai transaksi sekitar Rp33,75 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kopi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi yang mempunyai rantai nilai nyata dan berpotensi dikaitkan dengan kebijakan penerimaan daerah (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025).

Pengembangan penerimaan dari sektor kopi harus tetap ditempatkan dalam batas kewenangan fiskal daerah. Pemerintah daerah tidak dapat membentuk pungutan terhadap produksi kopi tanpa dasar hukum yang jelas. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi atas pelayanan tempat pelelangan hasil bumi. Dalam Lampiran mengenai struktur dan tarif Retribusi Tempat Pelelangan, komoditas kopi dikenakan tarif Rp250/kg, sedangkan kopi kering dikenakan tarif Rp150/kg dan kopi gabah Rp250 per kaleng (Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tarif Rp250/kg sebagai parameter simulasi untuk komoditas kopi yang menjadi objek pelayanan retribusi, bukan sebagai pungutan umum atas seluruh produksi kopi di Kabupaten Gayo Lues.

Pemilihan tarif tersebut juga mempunyai dukungan empiris dalam perkembangan kebijakan kopi Gayo Lues. Monitoring Badan Narkotika Nasional terhadap pengembangan komoditas kopi di Gayo Lues sebelumnya telah mencatat rencana penerapan kontribusi PAD sebesar Rp250/kg. Laporan kinerja BNN yang lebih mutakhir selanjutnya memperkirakan bahwa dengan produksi sekitar 300 ton per tahun, retribusi Rp250/kg berpotensi memberikan penerimaan sekitar Rp75 juta per tahun. Pada skala aktivitas yang lebih tinggi, laporan yang sama memperkirakan potensi penerimaan sekitar Rp400 juta per tahun berdasarkan volume 800 ton per musim dengan dua kali panen dan tarif Rp250/kg (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025). Data tersebut menunjukkan adanya hubungan yang dapat diukur antara volume kopi yang menjadi basis pelayanan, tarif retribusi, efektivitas pemungutan, dan penerimaan daerah.

Namun demikian, keberadaan potensi fiskal tidak serta-merta berarti seluruh potensi dapat direalisasikan. Efektivitas penerimaan retribusi bergantung pada sejumlah aspek, seperti ketersediaan basis data objek retribusi, volume kopi yang benar-benar menggunakan fasilitas atau pelayanan pemerintah daerah, kepatuhan pengguna layanan, kualitas administrasi pemungutan, mekanisme pembayaran, pengawasan, dan tingkat kebocoran penerimaan. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah mencakup proses pendataan, penetapan,

pembayaran dan penyetoran, pelaporan, penagihan, penghapusan piutang, serta kerja sama optimalisasi pemungutan (Pemerintah RI, 2023). Dengan demikian, peningkatan penerimaan seharusnya tidak hanya didekati melalui penetapan tarif, tetapi juga melalui peningkatan tingkat realisasi potensi yang tersedia.

Sebagian penelitian terdahulu mengenai desentralisasi fiskal lebih banyak menganalisis hubungan antara PAD, transfer, belanja, dan kemandirian fiskal dengan menggunakan data historis atau pendekatan ekonometrika. Studi mengenai PAD juga umumnya menganalisis kontribusi pajak dan retribusi secara agregat terhadap kemandirian fiskal daerah (Hasanah et al., 2025) (Anggraeni et al., 2024). Kajian tersebut memberikan landasan penting mengenai hubungan antara PAD dan kapasitas fiskal, tetapi belum secara spesifik menjawab bagaimana perubahan tingkat realisasi retribusi pada suatu komoditas unggulan daerah dapat disimulasikan sebelum suatu strategi kebijakan dilaksanakan.

Pendekatan simulasi kebijakan dapat digunakan untuk mengisi ruang analisis tersebut. Pemodelan dinamis memungkinkan pembuat kebijakan mengeksplorasi konsekuensi berbagai perubahan parameter dan membandingkan alternatif kebijakan tanpa harus terlebih dahulu menerapkannya pada sistem nyata. (Rian Andhika, 2019) menjelaskan bahwa model sistem dinamis dapat digunakan sebagai perangkat simulasi dalam formulasi kebijakan untuk melihat perubahan perilaku sistem dan menguji berbagai alternatif kebijakan, sedangkan (Malbon & Parkhurst, 2023) menunjukkan bahwa system dynamics modelling dapat membantu penggunaan bukti dalam proses pembuatan kebijakan ketika suatu masalah mempunyai hubungan antarvariabel yang kompleks.

Berangkat dari kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian pada kebutuhan untuk mengintegrasikan potensi komoditas kopi, tarif retribusi yang mempunyai dasar regulasi, tingkat realisasi pemungutan, dan implikasinya terhadap penerimaan daerah dalam satu kerangka simulasi kebijakan. Penelitian ini tidak menempatkan retribusi kopi sebagai satu-satunya instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal Gayo Lues, melainkan sebagai salah satu alternatif diversifikasi sumber PAD yang dapat dioptimalkan berdasarkan karakteristik ekonomi lokal. Pendekatan ini menjadi relevan karena meskipun retribusi daerah secara keseluruhan telah memberikan kontribusi besar terhadap PAD Gayo Lues, masih diperlukan pemetaan sumber-sumber spesifik dan pengujian kebijakan untuk mengetahui batas potensi, tingkat realisasi, serta materialitas kontribusinya terhadap struktur fiskal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi potensi penerimaan retribusi sektor kopi di Kabupaten Gayo Lues berdasarkan struktur tarif yang berlaku; (2) mensimulasikan penerimaan retribusi pada beberapa tingkat realisasi kebijakan; dan (3) menganalisis implikasi optimalisasi retribusi sektor kopi terhadap penguatan desentralisasi fiskal Kabupaten Gayo Lues. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian mengembangkan simulasi kebijakan menggunakan Powersim Studio 10 Express dengan skenario tingkat realisasi retribusi sebesar 0%, 30%, 50%, 70%, dan 100%.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian, data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan metode simulasi kebijakan berbasis model kausal. Simulasi dikembangkan menggunakan Powersim Studio 10 Express untuk menggambarkan hubungan antara potensi ekonomi sektor kopi, tarif retribusi, tingkat realisasi pemungutan, penerimaan retribusi, serta kontribusinya terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Gayo Lues.

Pemodelan digunakan terutama sebagai policy experimentation tool, yaitu untuk membandingkan konsekuensi beberapa alternatif tingkat realisasi kebijakan tanpa terlebih dahulu menerapkannya pada sistem nyata. Pendekatan ini relevan karena model sistem dinamis berskala kecil dapat membantu pembuat kebijakan melakukan eksperimen parameter, memahami hubungan sebab-akibat, dan mengidentifikasi titik intervensi kebijakan secara lebih transparan (Ghaffarzadegan et al., 2011).

Model yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sederhana dengan fokus pada subsistem penerimaan retribusi kopi. Oleh karena itu, simulasi tidak dimaksudkan sebagai prediksi deterministik terhadap kondisi fiskal Kabupaten Gayo Lues pada masa mendatang, tetapi sebagai analisis skenario kebijakan untuk mengukur perubahan penerimaan pada tingkat realisasi retribusi yang berbeda. Penggunaan model sederhana tetap relevan dalam proses kebijakan selama batas model, asumsi, parameter, dan hubungan antarvariabel dinyatakan secara eksplisit (Ghaffarzadegan et al., 2011).

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber resmi. Data fiskal Kabupaten Gayo Lues bersumber dari Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk APBD Tahun 2024. Berdasarkan data realisasi sampai dengan Desember 2024, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues mencapai Rp847,45 miliar, PAD Rp68,34 miliar, Pajak Daerah Rp6,81 miliar, Retribusi Daerah Rp49,09 miliar, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp748,32 miliar (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

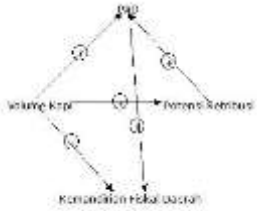
Data kebijakan tarif menggunakan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten. Dalam Lampiran VI mengenai struktur dan tarif Retribusi Tempat Pelelangan, komoditas kopi ditetapkan sebesar Rp250/kg, sedangkan kopi kering sebesar Rp150/kg. Karena objek penelitian difokuskan pada kategori kopi yang menggunakan parameter Rp250/kg, angka tersebut digunakan sebagai tarif dasar simulasi.

Penggunaan realisasi fiskal tahun 2024 sebagai denominator dan potensi kopi tahun 2025 sebagai parameter simulasi dilakukan sebagai benchmark analysis, bukan sebagai perbandingan kausal antar-tahun. Postur fiskal 2024 dipilih karena merupakan data realisasi tahunan yang telah tersedia secara lengkap, sedangkan volume kopi digunakan untuk mengestimasi materialitas fiskal apabila kebijakan tersebut dilaksanakan.

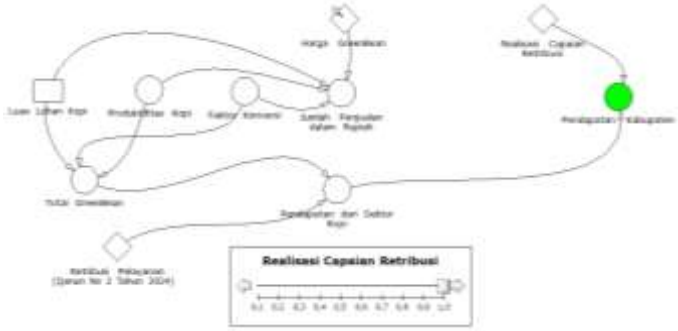
Struktur Model

Struktur model dibangun berdasarkan hubungan kausal berikut:

.



Gambar 1. Model Hubungan Kausal



Gambar 2. Causal Loop Diagram Simulasi Kebijakan

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Diagram hubungan kausal menunjukkan bahwa volume kopi memiliki hubungan positif dengan potensi retribusi, PAD, dan kemandirian fiskal daerah. Peningkatan volume kopi diasumsikan memperbesar basis aktivitas ekonomi yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga meningkatkan potensi retribusi. Peningkatan potensi retribusi selanjutnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD apabila potensi tersebut dapat direalisasikan melalui mekanisme pemungutan yang efektif. Peningkatan PAD kemudian memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan menggunakan sumber pendapatan sendiri. Dengan demikian, volume kopi dapat memengaruhi kemandirian fiskal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi retribusi dan PAD.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel dalam Model

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Faktor Konversi	0,2	Angka
Harga GreenBean	155.000	Rupiah
Jumlah Penjualan dalam Rupiah	('Luas Lahan Kopi'*'Faktor Konversi'*'Produktifitas Kopi'*1000)*'Harga GreenBean'	Rupiah
Luas Lahan Kopi	3500	Ha
Pendapatan dari Sektor Kopi	'Total GreenBean'*'Retribusi Pelayanan'	Rupiah
Pendapatan Kabupaten	'Pendapatan dari Sektor Kopi'*'Realisasi Capaian Retribusi'	Rupiah
Produktifitas Kopi	0,8	Angka
Realisasi Capaian Retribusi	1	Persentase*100

Retribusi Pelayanan	250	Rupiah
Total GreenBean	'Luas Lahan Kopi'*'Produktifitas Kopi'*1000*'Faktor Konversi'	Kilogram

Skenario Kebijakan

Penelitian membangun lima skenario tingkat realisasi retribusi:

Kode	Skenario	Realisasi
S0	Tanpa realisasi	0%
S1	Realisasi rendah	30%
S2	Realisasi moderat	50%
S3	Realisasi tinggi	70%
S4	Realisasi optimal	100%

Skenario 100% digunakan sebagai upper-bound benchmark, bukan sebagai asumsi bahwa seluruh potensi pasti dapat dipungut. Dalam Powersim, parameter Realisasi Capaian Retribusi ditetapkan masing-masing: 0; 0,30; 0,50; 0,70; dan 1,00.

Validasi Model

Validasi dilakukan melalui validasi struktur, uji kondisi ekstrem, dan analisis sensitivitas. Validasi struktur dilakukan dengan memastikan setiap hubungan antarvariabel sesuai dengan mekanisme ekonomi dan regulasi. Tarif retribusi diverifikasi berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024. Uji kondisi ekstrem dilakukan dengan menetapkan realisasi sebesar 0% dan 100%. Pada realisasi 0%, model harus menghasilkan penerimaan Rp0, sedangkan pada realisasi 100% penerimaan harus sama dengan seluruh potensi retribusi.

Analisis sensitivitas dilakukan melalui perubahan tingkat realisasi dari 0% sampai dengan 100%. Pengujian berbagai parameter merupakan salah satu kegunaan penting model sistem dinamis kecil dalam analisis kebijakan karena membantu memperlihatkan bagaimana perubahan asumsi menghasilkan perubahan keluaran kebijakan (Ghaffarzadegan et al., 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fiskal Kabupaten Gayo Lues

Data SIKD menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2024 mencapai Rp847,45 miliar, atau 98,53% dari anggaran Rp860,13 miliar. Realisasi PAD mencapai Rp68,34 miliar, sedikit lebih tinggi daripada anggarannya sebesar Rp68,08 miliar, sehingga tingkat realisasi PAD mencapai 100,39%.

Komponen PAD menunjukkan bahwa Retribusi Daerah merupakan komponen yang sangat besar, dengan realisasi sekitar Rp49,09 miliar, sementara Pajak Daerah mencapai Rp6,81 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp3,48 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp8,96 miliar.

Rasio PAD terhadap total realisasi pendapatan daerah dapat dihitung:

= 8,06%

Dengan demikian, PAD membentuk sekitar 8,06% dari realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Sebaliknya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp748,32 miliar menghasilkan rasio:

= 88,30%

Artinya, sekitar 88,30% pendapatan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target PAD yang tinggi tidak identik dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Suatu pemerintah daerah dapat mencapai atau bahkan melampaui target PAD, tetapi struktur penerimaannya tetap didominasi transfer.

Retribusi Daerah sendiri menyumbang sekitar:

= 71,83%

dari total PAD. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan retribusi memiliki posisi strategis dalam komposisi PAD Kabupaten Gayo Lues.

Secara lebih luas, temuan tersebut relevan dengan penelitian (Hasanah et al., 2025), yang menggunakan data 542 pemerintah daerah di Indonesia dan menunjukkan bahwa komponen PAD, termasuk retribusi daerah, berhubungan positif dengan penguatan kemandirian fiskal. Namun, peningkatan PAD perlu ditempatkan dalam konteks keseluruhan struktur pendapatan daerah, terutama ketika transfer masih dominan.

Hasil Simulasi Kebijakan

Berdasarkan struktur hubungan kausal yang telah dibangun, selanjutnya dilakukan penyusunan parameter awal sebagai dasar simulasi model. Parameter tersebut mencakup luas lahan kopi, total produksi *green bean*, besaran retribusi pelayanan, pendapatan dari sektor kopi, pendapatan kabupaten, serta realisasi capaian retribusi pada periode 2025–2030. Nilai awal ini digunakan untuk menggambarkan kondisi dasar (*baseline*) sebelum dilakukan eksperimen terhadap berbagai skenario kebijakan. Dengan demikian, hasil simulasi pada tahap berikutnya dapat digunakan untuk melihat perubahan penerimaan daerah yang terjadi akibat variasi tingkat realisasi kebijakan retribusi.

year	Luas Lahan Kopi	Total GreenBean	Retribusi Pelayanan	Pendapatan dari Sektor Kopi	Pendapatan Kabupaten	Realisasi Capaian Retribusi
2.025	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.026	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.027	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.028	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.029	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	0,00	0,00
2.030	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	0,00	0,00

Gambar 3. Skenario tanpa Intervensi

Berdasarkan hasil simulasi kondisi awal (*baseline*) pada periode 2025–2030, luas lahan kopi ditetapkan tetap sebesar 3.500,00, sedangkan total produksi *green bean* sebesar 560.000,00 pada setiap tahun simulasi. Besaran retribusi pelayanan juga diasumsikan konstan sebesar 250,00. Dengan parameter

tersebut, potensi pendapatan dari sektor kopi diperoleh sebesar 140.000.000,00 per tahun, yang merupakan hasil perkalian antara total *green bean* dan besaran retribusi pelayanan.

Namun demikian, pada kondisi awal model, nilai pendapatan kabupaten dan realisasi capaian retribusi masih menunjukkan angka 0,00 selama periode simulasi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa potensi penerimaan yang tersedia belum dikonversi menjadi penerimaan daerah yang terealisasi. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara potensi penerimaan retribusi dan realisasi penerimaan retribusi. Potensi sebesar 140.000.000,00 menunjukkan kapasitas penerimaan yang secara teoritis dapat diperoleh dari aktivitas sektor kopi, sedangkan realisasi penerimaan sangat bergantung pada tingkat implementasi atau capaian kebijakan retribusi.

Kondisi *baseline* ini selanjutnya digunakan sebagai titik pembanding dalam eksperimen kebijakan. Melalui perubahan nilai realisasi capaian retribusi, dapat dianalisis seberapa besar bagian dari potensi penerimaan sektor kopi yang dapat dikonversi menjadi pendapatan kabupaten. Semakin tinggi tingkat realisasi kebijakan, semakin besar pula penerimaan retribusi yang dapat masuk ke pendapatan daerah. Oleh karena itu, simulasi skenario diperlukan untuk membandingkan dampak beberapa tingkat realisasi kebijakan terhadap penerimaan daerah selama periode 2025–2030.

year	Luas Lahan Kopi	Total GreenBean	Retribusi Pelayanan	Pendapatan dari Sektor Kopi	Pendapatan Kabupaten	Realisasi Capaian Retribusi
2.025	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	42.000.000,00	0,30
2.026	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	42.000.000,00	0,30
2.027	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	42.000.000,00	0,30
2.028	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	42.000.000,00	0,30
2.029	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	42.000.000,00	0,30
2.030	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	42.000.000,00	0,30

Gambar 4. Simulasi dengan Skenario 30%

Hasil simulasi skenario realisasi capaian retribusi sebesar 30% menunjukkan bahwa dari potensi pendapatan sektor kopi sebesar Rp140.000.000 per tahun, pendapatan yang dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten adalah sebesar Rp42.000.000 per tahun. Nilai tersebut diperoleh dari perkalian antara potensi pendapatan sektor kopi dan tingkat realisasi kebijakan sebesar 0,30. Selama periode 2025–2030, nilai penerimaan relatif konstan karena luas lahan, volume produksi *green bean*, dan tarif retribusi diasumsikan tidak mengalami perubahan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat realisasi kebijakan dari kondisi awal 0% menjadi 30% mampu menghasilkan tambahan penerimaan daerah, meskipun masih terdapat 70% potensi pendapatan yang belum berhasil direalisasikan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan retribusi menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan kontribusi sektor kopi terhadap pendapatan daerah.

year	Luas Lahan Kopi	Total GreenBean	Retribusi Pelayanan	Pendapatan dari Sektor Kopi	Pendapatan Kabupaten	Realisasi Capaian Retribusi
2.025	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	70.000.000,00	0,50
2.026	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	70.000.000,00	0,50
2.027	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	70.000.000,00	0,50
2.028	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	70.000.000,00	0,50
2.029	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	70.000.000,00	0,50
2.030	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	70.000.000,00	0,50

Gambar 5. Simulasi dengan Skenario 50%

Hasil simulasi pada skenario realisasi capaian retribusi sebesar 50% menunjukkan bahwa dari potensi pendapatan sektor kopi sebesar Rp140.000.000 per tahun, pemerintah kabupaten mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp70.000.000 per tahun. Nilai tersebut diperoleh melalui penerapan tingkat realisasi sebesar 0,50 terhadap potensi pendapatan sektor kopi. Selama periode 2025–2030, nilai penerimaan tetap konstan karena variabel luas lahan, produksi *green bean*, tarif retribusi, dan tingkat realisasi kebijakan diasumsikan tidak mengalami perubahan. Dibandingkan dengan skenario realisasi 30%, skenario 50% menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp28.000.000 per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat realisasi kebijakan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan kabupaten, sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan retribusi menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor kopi.

year	Luas Lahan Kopi	Total GreenBean	Retribusi Pelayanan	Pendapatan dari Sektor Kopi	Pendapatan Kabupaten	Realisasi Capaian Retribusi
2.025	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	98.000.000,00	0,70
2.026	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	98.000.000,00	0,70
2.027	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	98.000.000,00	0,70
2.028	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	98.000.000,00	0,70
2.029	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	98.000.000,00	0,70
2.030	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	98.000.000,00	0,70

Gambar 6. Simulasi dengan Skenario 70%

Hasil simulasi pada skenario realisasi capaian retribusi sebesar 70% menunjukkan bahwa dari potensi pendapatan sektor kopi sebesar Rp140.000.000 per tahun, pemerintah kabupaten mampu merealisasikan penerimaan sebesar Rp98.000.000 per tahun. Nilai tersebut diperoleh melalui penerapan tingkat realisasi sebesar 0,70 terhadap total potensi pendapatan sektor kopi. Selama periode 2025–2030, nilai penerimaan relatif konstan karena variabel luas lahan, produksi *green bean*, tarif retribusi, dan tingkat realisasi kebijakan diasumsikan tetap. Dibandingkan dengan skenario 30% dan 50%, skenario 70% menghasilkan pendapatan kabupaten yang lebih tinggi, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas realisasi retribusi berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah. Namun demikian, masih terdapat 30% potensi penerimaan yang belum terealisasi, sehingga upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan tetap diperlukan untuk mendekati tingkat penerimaan yang optimal.

year	Luas Lahan Kopi	Total GreenBean	Retribusi Pelayanan	Pendapatan dari Sektor Kopi	Pendapatan Kabupaten	Realisasi Capaian Retribusi
2.025	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00
2.026	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00
2.027	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00
2.028	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00
2.029	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00
2.030	3.500,00	560.000,00	250,00	140.000.000,00	140.000.000,00	1,00

Gambar 7. Simulasi dengan Skenario 100%

Hasil simulasi pada skenario realisasi capaian retribusi sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh potensi pendapatan sektor kopi sebesar Rp140.000.000 per tahun dapat direalisasikan menjadi pendapatan kabupaten. Nilai tersebut diperoleh ketika tingkat realisasi capaian retribusi ditetapkan sebesar 1,00. Selama periode 2025–2030, pendapatan kabupaten tetap sebesar Rp140.000.000 per tahun karena luas lahan, produksi *green bean*, tarif retribusi pelayanan, dan tingkat realisasi kebijakan diasumsikan

konstan. Secara kumulatif, penerimaan yang dapat diperoleh selama enam tahun mencapai Rp840.000.000. Dibandingkan dengan skenario realisasi 30%, 50%, dan 70%, skenario 100% menghasilkan penerimaan tertinggi dan menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi retribusi berpengaruh langsung terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Namun, skenario 100% lebih tepat diposisikan sebagai **skenario batas atas (***upper-bound scenario***)** untuk menunjukkan potensi maksimal model, bukan sebagai prediksi bahwa seluruh potensi penerimaan pasti dapat direalisasikan dalam kondisi aktual.

Pembahasan

Kondisi fiskal Kabupaten Gayo Lues menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara efektivitas pencapaian target PAD dan kemandirian fiskal daerah. Realisasi PAD tahun 2024 yang mencapai Rp68,34 miliar atau 100,39% dari target menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Namun, capaian tersebut belum dapat diartikan bahwa Kabupaten Gayo Lues telah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Hal ini terlihat dari kontribusi PAD yang hanya sekitar 8,06% terhadap total realisasi pendapatan daerah, sementara transfer pemerintah pusat mencapai sekitar 88,30%. Dengan demikian, struktur pendapatan Kabupaten Gayo Lues masih didominasi sumber pendapatan eksternal. Kondisi tersebut sejalan dengan Syafri et al., (2024), yang menemukan bahwa setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal, ketergantungan sebagian pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas PAD merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan pula antara rasio kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Nilai 8,06% yang diperoleh dari perbandingan PAD dengan total pendapatan lebih tepat disebut sebagai kontribusi PAD atau derajat desentralisasi fiskal. Sementara itu, salah satu rumus yang lazim digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah perbandingan PAD terhadap pendapatan transfer. Dengan menggunakan data Kabupaten Gayo Lues, rasio tersebut adalah sekitar 9,13%, yaitu Rp68,34 miliar dibagi Rp748,32 miliar. Dalam praktik analisis keuangan daerah yang digunakan Kementerian Keuangan, rasio PAD terhadap transfer di bawah 25% menggambarkan tingkat kemandirian yang sangat rendah dengan pola hubungan yang bersifat instruktif. Oleh karena itu, apabila penelitian ini menggunakan istilah "kemandirian fiskal", akan lebih tepat apabila rasio 9,13% digunakan sebagai salah satu indikatornya, sedangkan 8,06% tetap digunakan untuk menggambarkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan (Kemenkeu, 2025).

Temuan tersebut memperoleh dukungan yang cukup kuat dari penelitian yang secara khusus dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Machfud, Asnawi, (2020), dengan menggunakan data 23 kabupaten/kota di Aceh periode 2013–2018, menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan dan dana otonomi

khusus mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan. Hasil tersebut relevan bagi Kabupaten Gayo Lues karena memperlihatkan bahwa peningkatan sumber penerimaan yang berasal dari kemampuan daerah sendiri menjadi penting ketika struktur fiskal masih sangat bergantung pada transfer.

Posisi retribusi menjadi semakin penting apabila memperhatikan komposisi PAD Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, realisasi retribusi daerah sebesar Rp49,09 miliar atau sekitar 71,83% dari total PAD. Tingginya proporsi tersebut menunjukkan bahwa retribusi merupakan salah satu instrumen penting dalam struktur PAD daerah. Hasanah et al., (2025), melalui penelitian terhadap 542 pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2019–2023, menemukan bahwa komponen PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa optimalisasi retribusi berpotensi memberikan kontribusi terhadap penguatan kemampuan fiskal daerah.

Meskipun demikian, hubungan antara retribusi dan kemandirian fiskal tidak selalu identik pada setiap daerah. Maya Novitasari, (2019), dengan menggunakan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2014–2017, menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, Maya Novitasari, (2019) menemukan bahwa meskipun PAD secara simultan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan Kota Bandung, secara parsial retribusi daerah justru menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut penting untuk pembahasan penelitian ini karena menunjukkan bahwa besarnya retribusi saja belum cukup. Efektivitas pemungutan, basis penerimaan, karakteristik ekonomi daerah, biaya pemungutan, kepatuhan, dan tata kelola penerimaan dapat menentukan seberapa jauh retribusi benar-benar memperkuat kemandirian fiskal.

Atas dasar tersebut, penggunaan sektor kopi sebagai salah satu sumber potensial penerimaan menjadi relevan karena kebijakan peningkatan PAD idealnya dikaitkan dengan potensi ekonomi unggulan daerah. Ginting, (2024) menunjukkan bahwa beberapa subsektor unggulan, termasuk tanaman dan produksi pertanian, memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD pada wilayah Indonesia Timur yang mereka teliti. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya menghubungkan strategi optimalisasi PAD dengan struktur dan keunggulan ekonomi wilayah, bukan hanya meningkatkan tarif atau intensitas pemungutan secara administratif. Meskipun penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas kopi di Gayo Lues, hasilnya memberikan dukungan konseptual bahwa pengembangan sumber pendapatan berbasis sektor unggulan dapat menjadi salah satu jalur untuk memperluas basis PAD.

Dalam penelitian ini, potensi tersebut dieksplorasi melalui simulasi kebijakan dengan mengubah tingkat realisasi capaian retribusi. Dengan asumsi luas lahan kopi sebesar 3.500, produksi *green bean* sebesar 560.000, dan nilai retribusi pelayanan sebesar 250 tetap sepanjang periode simulasi, diperoleh potensi penerimaan sebesar Rp140 juta per tahun. Perubahan tingkat realisasi menghasilkan penerimaan sebesar

Rp42 juta pada skenario 30%, Rp70 juta pada skenario 50%, Rp98 juta pada skenario 70%, dan Rp140 juta pada skenario 100%. Secara kumulatif selama 2025–2030, masing-masing skenario menghasilkan Rp252 juta, Rp420 juta, Rp588 juta, dan Rp840 juta. Pola tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan meningkat secara proporsional mengikuti tingkat realisasi kebijakan.

Hasil simulasi tersebut perlu dipahami sebagai eksperimen kebijakan, bukan sebagai proyeksi deterministik mengenai jumlah penerimaan yang pasti akan diperoleh pemerintah daerah. Karena produksi, luas lahan, nilai retribusi, dan variabel lainnya dibuat konstan, hubungan antara tingkat realisasi dan pendapatan kabupaten bersifat linier berdasarkan konstruksi model. Nilai utama simulasi justru terletak pada kemampuannya memperlihatkan sensitivitas penerimaan terhadap perubahan tingkat implementasi kebijakan. Pendekatan ini sesuai dengan Ghaffarzadegan et al., (2011), yang menjelaskan bahwa model sistem dinamis berskala kecil bermanfaat dalam proses kebijakan karena memungkinkan eksperimen perubahan parameter, analisis sensitivitas, identifikasi *leverage points*, serta penyampaian konsekuensi kebijakan secara lebih transparan kepada pembuat keputusan.

Namun, apabila hasil simulasi ditempatkan dalam struktur fiskal Kabupaten Gayo Lues secara keseluruhan, pengaruh fiskalnya masih relatif kecil. Pada skenario maksimum 100%, tambahan penerimaan sebesar Rp140 juta per tahun hanya setara sekitar 0,205% dari PAD tahun 2024 sebesar Rp68,34 miliar, dan sekitar 0,0165% dari total pendapatan daerah sebesar Rp847,45 miliar. Bahkan apabila seluruh Rp140 juta tersebut diasumsikan menjadi tambahan PAD dan pendapatan transfer tetap, rasio PAD terhadap transfer hanya berubah dari sekitar 9,132% menjadi 9,151%, atau meningkat sekitar 0,019 poin persentase. Dengan demikian, optimalisasi retribusi sektor kopi memang menghasilkan tambahan PAD, tetapi pada skala potensi yang digunakan dalam model, kebijakan tersebut belum cukup untuk mengubah struktur ketergantungan fiskal Kabupaten Gayo Lues secara fundamental.

Temuan tersebut merupakan salah satu hasil penting penelitian. Kebijakan retribusi kopi tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan besarnya nominal Rp42 juta sampai Rp140 juta yang dihasilkan, tetapi berdasarkan posisinya sebagai salah satu bagian dari strategi diversifikasi dan penguatan basis PAD. Hasanah et al., (2025) menunjukkan bahwa penguatan berbagai komponen PAD secara bersama-sama berkaitan dengan peningkatan kemandirian fiskal, sedangkan Syafri et al., (2024) menekankan adanya perbedaan karakteristik antardaerah sehingga strategi penguatan kemandirian tidak dapat bertumpu pada satu instrumen penerimaan saja. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan dari sektor kopi perlu ditempatkan bersama dengan pengembangan pajak daerah, pengelolaan aset, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, perbaikan administrasi penerimaan, dan perluasan sumber PAD lain yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Gayo Lues.

Terdapat pula aspek regulasi yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan variabel "retribusi pelayanan" sebesar 250 dalam model. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan barang atau jasa dan pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah

daerah; retribusi tidak dapat semata-mata dibentuk sebagai pungutan terhadap suatu komoditas. UU tersebut membagi retribusi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk sektor hasil bumi, salah satu objek yang dimungkinkan antara lain penyediaan tempat pelelangan hasil bumi sebagai bagian dari jasa usaha pemerintah daerah. PP Nomor 35 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa jenis, objek, dan rincian objek retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi. Oleh sebab itu, dalam penelitian perlu dijelaskan pelayanan pemerintah daerah apa yang menjadi dasar retribusi Rp250 tersebut. Jika Rp250 hanya diasumsikan sebagai pungutan untuk setiap unit produksi kopi tanpa pelayanan atau objek retribusi yang sah, maka asumsi tersebut memerlukan revisi agar tidak menimbulkan persoalan normatif.

Dari perspektif pengembangan model, asumsi produksi *green bean*, luas lahan, dan tarif yang konstan selama enam tahun berguna untuk mengisolasi pengaruh tingkat realisasi kebijakan. Akan tetapi, asumsi tersebut sekaligus membatasi kemampuan model dalam menggambarkan dinamika sistem secara lebih lengkap. Pada kondisi aktual, produksi kopi dapat berubah akibat produktivitas, luas tanaman produktif, harga, kondisi iklim, investasi, dan respons petani. Realisasi retribusi juga dapat dipengaruhi oleh kepatuhan, kualitas administrasi, kapasitas petugas, biaya pemungutan, serta kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menegaskan bahwa model yang digunakan merupakan model kebijakan sederhana untuk eksperimen skenario, bukan model prediksi komprehensif. Hal tersebut justru konsisten dengan penggunaan *small system dynamics model* apabila tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang transparan mengenai dampak perubahan parameter kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan realisasi penerimaan dari sektor kopi memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah, tetapi kekuatan dampaknya sangat bergantung pada skala basis penerimaan yang tersedia. Skenario 100% menunjukkan batas maksimum model sebesar Rp140 juta per tahun, tetapi jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan PAD dan transfer yang diterima Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian, hasil simulasi lebih tepat dimaknai sebagai bukti bahwa perbaikan realisasi kebijakan mampu menutup kesenjangan antara potensi dan penerimaan aktual, bukan sebagai bukti bahwa retribusi kopi secara tunggal mampu mewujudkan kemandirian fiskal. Penguatan kemandirian fiskal memerlukan strategi yang lebih luas melalui optimalisasi berbagai komponen PAD, pemanfaatan sektor ekonomi unggulan, peningkatan kualitas tata kelola penerimaan, serta pengurangan ketergantungan struktural terhadap pendapatan transfer.

KESIMPULAN

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan desentralisasi fiskal tidak cukup dinilai dari tercapainya target PAD, tetapi perlu dilihat dari kemampuan daerah memperbesar basis penerimaan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa retribusi sektor unggulan seperti kopi dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen diversifikasi PAD, meskipun kontribusinya terhadap kemandirian fiskal tetap bergantung pada skala potensi penerimaan,

efektivitas pemungutan, serta struktur pendapatan daerah secara keseluruhan. Temuan simulasi memperlihatkan bahwa peningkatan tingkat realisasi kebijakan berpengaruh positif dan proporsional terhadap penerimaan daerah, sehingga efektivitas implementasi menjadi variabel penting dalam optimalisasi potensi retribusi.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menyusun kebijakan optimalisasi retribusi kopi secara lebih terukur. Pemerintah daerah dapat menggunakan skenario realisasi 30%, 50%, dan 70% sebagai alternatif target bertahap, sedangkan skenario 100% diposisikan sebagai batas atas potensi penerimaan. Peningkatan realisasi sebaiknya didukung oleh penguatan basis data objek retribusi, pencatatan volume kopi yang menggunakan pelayanan pemerintah daerah, perbaikan administrasi pembayaran dan penyetoran, peningkatan kepatuhan, serta pengawasan yang lebih efektif. Implementasi kebijakan juga harus tetap mengacu pada dasar hukum retribusi yang berlaku dan dikaitkan dengan pelayanan yang secara sah menjadi objek retribusi daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena model yang digunakan masih bersifat sederhana dan memfokuskan analisis pada perubahan tingkat realisasi retribusi, sementara luas lahan, produktivitas, volume produksi, tarif, dan sejumlah faktor lainnya diasumsikan konstan selama periode simulasi. Kondisi tersebut membuat model lebih tepat digunakan sebagai *policy experimentation tool* daripada sebagai instrumen prediksi fiskal jangka panjang. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model dengan memasukkan variabel yang lebih dinamis, seperti perubahan produktivitas, luas lahan produktif, harga kopi, kepatuhan pengguna layanan, biaya pemungutan, kualitas pelayanan, dan respons pelaku usaha sehingga interaksi kebijakan dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2024). The Effect of Fiscal Decentralization on Economic Convergence amongst Regions in Java Island (Spatial Econometric Approach). Sanskara Akuntansi Dan Keuangan, 2(02 SE-Articles), 123–133. https://doi.org/10.58812/sak.v2i02.291

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun 2025. 2025.

Ghaffarzadegan, N., Lyneis, J., & Richardson, G. P. (2011). How small system dynamics models can help the public policy process. System Dynamics Review, 27(1), 22–44. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/sdr.442

Ginting, R. K. (2024). The Role of Leading Subsectors on Provincial Own-Source Revenue in Eastern Indonesia with Archipelagic Characteristics in 2015–2023. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 6(1), 55–67.

Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada, T. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. Owner, 9(4), 2950–2963. https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788

Indonesia, R. (2022). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia, 3(1), 8–14.

Kemenkeu. (2025). Tinjauan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 s.d. 2024. 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Portal Data SIKD: Postur APBD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024. 2025.

Machfud, Asnawi, N. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota provinsi aceh. 5(1), 14–31.

Malbon, E., & Parkhurst, J. (2023). System dynamics modelling and the use of evidence to inform policymaking. Policy Studies, 44(4), 454–472. https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2080814

Maya Novitasari, L. N. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. 3(2).

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. (2024). Qanun No 2 Tahun 2024.

Pemerintah RI. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 145795, 3.

Rian Andhika, L. (2019). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik [Dynamic System Model: Simulation Method in Formulation Public Policy]. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 10, 73–86. https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242

Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 9(4 SE-Articles), 277–290. https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858

Tuah, S. N., & Ompusunggu, D. P. (2025). Leading sector analysis for strengthening local own-source revenue: Evidence from Pulang Pisau Indonesia. JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen & Bisnis, Akuntansi, 5(1), 149–165. https://doi.org/10.52300/jemba.v5i1.22434